

ABSTRAK

Peningkatan mobilitas masyarakat dan pertumbuhan motorisasi di Indonesia menyebabkan peningkatan terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan, yang dimana dalam setiap terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan menimbulkan kerugian ekonomi bagi korbannya, sehingga dalam hal ini negara dalam menjamin perlindungan bagi masyarakatnya memberikan jaminan yaitu pertanggungan wajib kecelakaan penumpang yaitu merupakan pertanggungan sosial yang bersifat wajib bagi setiap penumpang yang menggunakan kendaraan bermotor umum, dalam hal ini negara diwakilkan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) yang notabene merupakan Badan Usaha Milik Negara. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaannya terdapat hambatan dalam perolehan ganti kerugian tersebut seperti adanya penolakan secara sepahak oleh perusahaan asuransi, oleh karena itu penting bagi masyarakat dan terkhusus korban kecelakaan lalu lintas jalan untuk mengetahui bagaimana pengaturan terkait ganti kerugian serta penyelesaian terhadap hambatan dalam proses ganti kerugian kasus kecelakaan lalu lintas jalan baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan beberapa pendekatan masalah yang terdapat aspek penyelesaian terhadap hambatan dalam pelaksanaan ganti kerugian terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan.

Kata Kunci: Kecelakaan, Ganti Kerugian, Penyelesaian.

ABSTRACT

The increase in community mobility and the growth of motorization in Indonesia have led to an increase in the occurrence of road traffic accidents, in which every road traffic accident results in economic losses for the victims, so that in this case the state guarantees protection for its people to provide guarantees, namely compulsory coverage for passenger accidents, which is a compulsory social coverage for every passenger using a public motorized vehicle, in this case the state is represented by PT. Jasa Raharja (Persero) which incidentally is a State Owned Enterprise. In connection with this, in its implementation there are obstacles in obtaining such compensation such as unilateral refusal by insurance companies, therefore it is important for the community and especially road traffic accident victims to know how the arrangements related to compensation and resolution of obstacles in the compensation process. loss of road traffic accident cases either through litigation or non-litigation channels. This study uses a normative juridical method by carrying out several problem approaches that contain aspects of solving obstacles in the implementation of compensation for road traffic accident victims.

Keywords: *Accident, Compensation, Settlement.*